



P E M E R I N T A H K O T A P A D A N G P A N J A N G  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan M. Yamin No. 88 Telp. 0752-82024 Padang Panjang

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 700/160.a/BKPSDM-PP/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2013-2018;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 700/160-a/BKPSDM-PP/2017  
Tanggal : 22 Mei 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan, dan rencana kinerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang,  
Pada tanggal 22 Mei 2017

A.n WALIKOTA PADANG PANJANG,  
KEPALA BKPSDM  
KOTA PADANG PANJANG



**MUERIDA,SH**  
Pembina Utama Muda / NIP. 19601106 198603 2 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang,
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang,
3. Arsip.

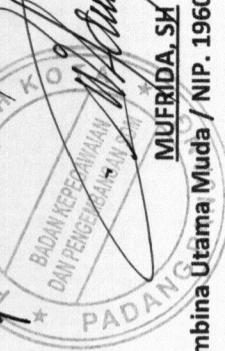
**Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang  
Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Keterangan/Kriteria
				Alasan	Formula/cara Pengukuran	
1	Terperuhnya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana BKPSDM	Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang BKPSDM	Unit	Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tupoksi BKPSDM	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi BKPSDM	BKPSDM
2	Terlaksananya pengembangan PNS yang sesuai dengan potensinya	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan sesuai potensinya	Orang	Belum optimalnya pengembangan SDM PNS yang sesuai dengan potensinya	Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan SDM	BKPSDM
3	Terciptanya PNS yang profesional	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kekinisan dalam peningkatan profesionalisme	Orang	Masih terdapat PNS yang belum mengikuti diklat PIM, Prajabatan dan diklat keahlian	Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM, Prajabatan dan diklat keahlian	BKPSDM
4	Munculnya PNS yang berkualitas	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	Kali	Keterbatasan anggaran menyebabkan terbatasnya diklat peningkatan kualitas PNS yang bisa dilaksanakan	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	BKPSDM
5	Terselenggaranya pembinaan dan Pengembangan PNS	Terlaksananya pembinaan PNS	Orang	Masih belum meratanya pemahaman PNS tentang peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian	Jumlah PNS yang menjalani pembinaan dan hukuman disiplin	BKPSDM
		Terlaksananya pengembangan PNS	Orang	Terdapatnya PNS yang telah memenuhi syarat untuk pengembangan karir melalui rotasi, mutasi, promosi, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, JFT dan pendidikan	Jumlah PNS yang telah dikembangkan karirnya melalui rotasi, mutasi, promosi, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, JFT dan pendidikan	BKPSDM

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Keterangan/Kriteria
				Alasan	Formulasi/cara Pengukuran	
6	Terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang mampu menyajikan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini	Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang mampu menyajikan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini	Dokumen	Belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian berbasis digital	Jumlah data pegawai yang telah tertata dengan baik dan terdigitalisasi	BKPSDM

Padang Panjang, 22 Mei 2017

Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang



MUFRIDA, SH

Pembina Utama Muda / NIP. 19601106 198603 2 001